

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.¹ Landasan hukum otonomi daerah dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Negara Indonesia terdiri dari banyak pulau dan daerah, pemerintah pusat menciptakan sistem otonomi daerah untuk memberikan pemerintah daerah lebih banyak kebebasan untuk mengelola sumber daya mereka secara optimal dan menangani masalah yang muncul disetiap daerah kekuasaan dengan dasar hukum

¹ Ristanti, Yulia Devi, And Eko Handoyo. "Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah." *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)* 2.1 (2017): 115-122.

² Destriana Indria Pamungkas, 2022. Landasan Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah. Artikel (Jakarta), Senin 07 Maret : 13:01 WIB

yang berlaku. Tujuan pemberian otonomi daerah untuk meningkatkan daya guna serta hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil dari penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis otonom dapat dilihat pada pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat guna meningkatkan stabilitas pemerintahan ditingkat daerah. Hal ini sejalan dengan fungsi nagari sebagai pelaksana pemerintahan lini terkecil dalam pemerintah daerah khususnya Provinsi Sumatera Barat.

Kebijakan otonomi daerah memberikan manfaat yang besar terhadap kelangsungan hidup daerah-daerah di Indonesia melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan kondisi sosial daerah masing-masing. Otonomi daerah memberikan peluang bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk melakukan pembangunannya secara maksimal. Umumnya, fokus pembangunan dari setiap daerah di Indonesia adalah pembangunan fisik berupa jalan, rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur penunjang kemajuan daerah. Melalui otonomi daerah juga, pemerintah daerah bisa meningkatkan kualitas pendidikan daerah, pelayanan kesehatan, bahkan pariwisata sesuai dengan kebutuhan paling pokok daerahnya.

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014, desa adalah bagian terkecil dari sistem pemerintahan. Desa dan nagari adalah bagian dari sistem pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus melalui nagari, yang berarti peran nagari sangat penting untuk keberhasilan kebijakan. Selain itu, undang-undang tersebut menyatakan bahwa desa atau nagari memiliki wewenang

untuk menerapkan otonomi daerah, yang berarti mereka memiliki wewenang untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan kehidupan mereka sendiri.³

Nagari merupakan lembaga pemerintah dan sekaligus sebuah lembaga pemberdayaan masyarakat, yang mana dalam nagari disebut kesatuan masyarakat hukum adat sebagai lembaga sosial utama yang dominan. Sebagai lembaga kesatuan masyarakat yang bersifat otonom, nagari sendiri seakan-akan jadi republik kecil dengan teritorial yang jelas bagi anggota-anggotanya. Nagari mempunyai pemerintahan sendiri, punya adat tersendiri dengan istilah “adat salingka nagari” yang mengatur tata kehidupan masyarakatnya.⁴

Maka dari itu, nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵ Umumnya, nagari sebagai bentuk kumpulan dari beberapa jorong/korong yang memiliki tujuan dan prinsip yang sama. Guna mencapai tujuan dan prinsip tersebut, nagari dipimpin oleh seorang wali nagari.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa nagari yang berfungsi sebagai lembaga adat sekaligus pemerintahan saling kait mengkait, jalin menjalin merupakan kesatuan yang integral. Hal tersebut diatur oleh pemerintah dalam

³ Janati, Nurlaili. (2021). Analisis Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Riau. *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (Jkues)*, 5(1), 44-49.

⁴Yusrizalbaharin, “Asal Usul Nagari Minangkabau,” 2021, dapat di akses melalui sumber link: <https://www.sumberprov.go.id/home/news/20935-asal-usul-nagari-minangkabau->.

⁵Peraturan Bupati Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2021.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor. 8 Tahun 2007 tentang pemerintahan nagari, pemerintah nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat nagari dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah nagari terdiri dari kapalo nagari atau nama lainnya dibantu oleh perangkat nagari.⁶

Kemudian, dengan adanya peraturan dalam nagari, dengan itu nagari memiliki tanggung jawab dan wewenang terhadap pembangunan yang lebih optimal dalam masyarakat nagari. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa yang mana seperti: (1) pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. (2) pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.⁷ Tujuan pembangunan nagari adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari dan kualitas hidup manusia serta untuk menangkal kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana nagari, serta adanya pengembangan potensial. Pembangunan mengacu pada perubahan suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan kebutuhan dasar dan keinginan individu dalam

⁶ Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Mengatur Tentang Pemerintahan Nagari.

⁷ Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

kelompok sosial yang berbeda, dengan tujuan menciptakan kondisi kehidupan yang lebih baik secara material dan spiritual.⁸

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa desa atau nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Desa atau nagari ini berfungsi sesuai dengan asal usul dan adat istiadat yang diakui serta dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini mencakup pelaksanaan pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan, yang sangat bermanfaat bagi kelancaran aktivitas masyarakat.

Pemerintah dan rakyat Indonesia saat ini berada dalam fase pembangunan yang bertujuan untuk mencapai cita-cita nasional, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses ini perlu terus ditingkatkan dan diarahkan ke kondisi yang lebih baik melalui pelaksanaan program pembangunan infrastruktur fisik.⁹ Infrastruktur, khususnya jaringan transportasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam kegiatan sehari-hari, berperan penting dalam mendukung aktivitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

⁸ (Bapenas), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bapenas. 2011. Laporan Akhir Pembangunan Perdesaan dalam Konteks Kesejahteraan Masyarakat. Jakarta: Kementerian PPN/ Bapenas, 130 hal

⁹ Sasmito, C. (2019). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 6(3).

Pembangunan fisik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari akan menciptakan lapangan kerja di sektor konstruksi. Dalam jangka menengah dan panjang, pembangunan ini akan mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas di sektor-sektor ekonomi. Dengan demikian, pembangunan fisik dapat dilihat sebagai strategi untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan, pertumbuhan ekonomi, kualitas hidup, serta mobilitas barang. Ketersediaan infrastruktur fisik yang baik memberikan dampak positif bagi aktivitas warga di nagari. Sebaliknya, jika pembangunan infrastruktur buruk, hal tersebut berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat. Misalnya, petani akan menghadapi kendala dalam mengangkut hasil panen, aktivitas siswa sekolah dasar terganggu saat pergi ke sekolah, yang dapat mengakibatkan keterlambatan atau bahkan menurunkan semangat belajar karena kondisi jalan yang kurang layak. Selain itu, bagi pengendara, kondisi jalan yang buruk meningkatkan risiko kecelakaan dan juga berdampak negatif pada perekonomian masyarakat.¹⁰

Pembangunan nagari mencakup pembangunan fisik dan non-fisik. Pendanaan untuk pembangunan ini bersumber dari pemerintah pusat dan daerah, yang kemudian disalurkan ke pemerintah kabupaten atau kota. Program-program dari tingkat pusat menjadi prioritas bagi pemerintah kabupaten atau kota, yang mengalokasikan sumber daya untuk mendukung pertumbuhan nagari. Sebelum program-program ini dibuat, masyarakat nagari berkonsultasi dengan Badan

¹⁰ Ibid, Hlm. 73

Permusyawaratan Nagari (BAMUS) dan Pemerintah Nagari.¹¹ Pertemuan tahunan yang dikenal sebagai Musrenbang Nagari (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari) menjadi forum utama dalam pengambilan keputusan penting terkait pembangunan.

Contoh pembangunan fisik di tingkat nagari (desa adat) meliputi:

- a) Pembangunan Jalan Desa: Pembangunan atau perbaikan jalan desa untuk memudahkan akses antar wilayah dalam nagari, memperlancar distribusi hasil tani, dan mempermudah warga dalam aktivitas sehari-hari.
- b) Pembangunan Jembatan Kecil: Jembatan yang menghubungkan area persawahan, ladang, atau antar dusun di dalam nagari, sehingga mempermudah mobilitas warga dan akses menuju lahan pertanian.
- c) Fasilitas Air Bersih: Pengadaan sarana air bersih seperti sumur bor, pipa air, atau penampungan air untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga nagari.
- d) Irigasi Sawah: Pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung pertanian warga, menjaga kelangsungan panen, dan mengoptimalkan hasil tani.
- e) Pusat Kesehatan Desa (Puskesmas Pembantu): Pembangunan atau peningkatan fasilitas kesehatan tingkat desa agar warga dapat mengakses layanan kesehatan dasar di nagari.

¹¹ Putri, N. D., Gusman, E., & Arman, Z. (2024). Implementasi Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Gotong Royong Dan Swadaya Masyarakat Di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang. *Palar (Pakuan Law Review)*, 10(3), 126-137.

- f) Fasilitas Pendidikan: Pembangunan atau rehabilitasi sekolah dasar atau taman kanak-kanak, serta sarana pendidikan lainnya, untuk memudahkan anak-anak di nagari dalam mengakses pendidikan.
- g) Pasar Nagari: Pembangunan pasar desa untuk tempat transaksi hasil bumi dan kerajinan, yang dapat mendorong perekonomian lokal.
- h) Balai Pertemuan atau Kantor Wali Nagari: Fasilitas ini berfungsi sebagai tempat pertemuan warga, kegiatan sosial, atau kantor pemerintahan nagari, yang mendukung administrasi dan kegiatan komunitas.
- i) Pembangunan Sarana Olahraga dan Ruang Publik: Misalnya, lapangan olahraga atau taman desa sebagai tempat rekreasi dan olahraga, yang mendukung kesehatan dan interaksi sosial warga nagari.
- j) Penerangan Jalan Umum (PJU): Pemasangan lampu penerangan di area jalan-jalan utama nagari untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga di malam hari.

Pembangunan ini sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari dan mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, serta kesehatan warganya.

Rencana pembangunan nagari, yang sering disamakan dengan rencana pembangunan kota atau kabupaten, disusun oleh pemerintah nagari sesuai dengan kewenangannya. Dua contoh perencanaan pembangunan nagari adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Nagari. RPJMNag disusun untuk jangka waktu enam tahun,

menguraikan visi dan misi Wali Nagari terpilih. Wali Nagari, yang menjabat selama enam tahun, diwajibkan menyusun ulang RPJM Nag paling lambat tiga bulan setelah dilantik.¹² RPJM Nag mendetailkan tujuan dan aspirasi Wali Nagari serta strategi untuk penegakan hukum dan kemajuan sosial-ekonomi di wilayah tersebut. Penyusunan RPJM Nag memperhitungkan kondisi objektif nagari serta prioritas pembangunan kabupaten atau kota

Pembangunan Nagari adalah dokumen yang menunjukkan arah, tujuan, dan kebijakan pembangunan di tingkat nagari. Kualitas Profil Nagari sangat penting untuk diperhatikan, baik dalam proses penyusunan, kualitas dokumen, maupun kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Profil Nagari, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Permendagri tersebut, serta mendorong dan memfasilitasi pemerintah nagari dalam menyusun profil nagari.¹³

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Pelangai disusun mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta PP 43 Tahun 2014 yang telah diubah dengan PP 47 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014. Selain itu, juga merujuk pada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Permendagri Nomor 114 menjelaskan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, arah kebijakan pembangunan desa, dan rencana kegiatan diberbagai bidang,

¹² Susanto, I. P., Suriyanto, N., Putri, R. E., & Zulsantoni, Z. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2020 di Nagari Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan. *Strata Business Review*, 1(1), 82-106.

¹³ M.Hasbi, Nagari, Desa dan Pembangunan Di Sumatera Barat, (Padang: Yayasan Genta Budaya, 1990, hal.12.

termasuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.¹⁴ Dokumen RPJM Nagari ini mencakup visi dan misi Wali Nagari, arah kebijakan pembangunan nagari, serta rencana pembangunan nagari untuk enam tahun ke depan. Penyusunannya melalui tahapan-tahapan yang diatur dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, dimulai dengan pelaksanaan Musyawarah Nagari untuk membentuk tim penyusun RPJMag pada tanggal 7 Agustus 2015, yang menjadi langkah awal dalam pelaksanaan pembangunan nagari.¹⁵

Dari penjelasan di atas bahwa pembangunan nagari dilaksanakan secara inisiatif. maka dari itu keterlibatan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat sangat penting untuk pelaksanaan suatu peningkatan pembangunan dalam nagari.¹⁶ Selain itu, penting untuk meningkatkan penghasilan masyarakat, terutama bagi anggota masyarakat yang memiliki pendapatan rendah, seperti buruh tani, petani, pengarab, nelayan, pengrajin, dan lainnya.

Dari beberapa literatur yang peneliti baca, terdapat lima penelitian yang memiliki fokus tentang pembangunan nagari, Adapun penelitiannya yaitu: Dina dan Wahyuni tahun 2023, yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dengan kewenangan dalam menetapkan kebijakan rencana pembangunan jangka

¹⁴ Pemerintah Daerah Tingkat Sumatera Barat. Petunjuk Pelaksanaan Manunggal Sakato, Pembangunan Desa Terpadu di Sumatera Barat. (Padang: Direktor Pembangunan Desa, 1985). hlm.7.

¹⁵ Fitra, Y. (2020). *Kebijakan Pembangunan Nagari Terhadap Masyarakat Pakan Rabaa Utara di kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2018* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

¹⁶ Wardoyo, H. (2018). *Peran Lembaga Nagari Dalam Meningkatkan Pembangunan di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

menengah nagari selalu melibatkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dan partisipasi masyarakat yang kuat, adapun permasalahan yang terjadi selalu diupayakan Pemerintah Nagari untuk dapat di atasi agar tidak berkepanjangan. menunjukkan kewenangan Pemerintah Nagari dalam peraturan perundang-undangan, dimana norma memerintahkan Pemerintah Nagari dalam melaksanakan pembangunan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat.¹⁷

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Putra Muhammad Aziz yang menjelaskan bahwa peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di desa suda cukup baik namun perlu ditingkatkan agar lebih optimal, hal ini dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemantauan. enunjukkan bahwa peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di desa sudah cukup baik namun perlu ditingkatkan agar lebih optimal, hal ini dilihat dari aspek (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Pengawasan dan pemantauan. Faktor pendukung dalam kegiatan ini, adanya partisipasi dan dukungan dari masyarakat, pendanaan APBD yang mencukupi untuk melakukan pembangunan, serta regulasi yang diberikan. Sedangkan faktor penghambat yaitu kendala dana/anggaran dan faktor alam.¹⁸

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Sena Aji Purnama (2023) yang menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh

¹⁷ Dina, W. (2023). *Implementasi Kewenangan Pemerintah Nagari Dalam Urusan Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi: Nagari Pakan Rabaa Utara, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan Periode Tahun 2018-2022)* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

¹⁸ Putra Muhammad Aziz. (2021), *Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh*. Skripsi, Hukum (Jambi). Hlm. 72.

Pemerintah Desa Lumaring dalam rangka menunjang aktifitas perekonomian masyarakat di Desa Lumaring memberikan dampak positif bagi Masyarakat Desa Lumaring meskipun masih ada beberapa pembangunan yang tidak berjalan dengan baik. Adapun pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan di Desa Luamring yaitu perbaikan akses jalan yang memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya, pembangunan drainase yang mempermudah masyarakat dalam menyalurkan air pada sawa dan perkebunannya.¹⁹

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Ade Hendra, Maiyulnita, dan Nasrizal 2021. Yang menjelaskan bahwa peran lembaga nagari sebagai pembina masyarakat dalam melayani masyarakat pemerintah nagari dapat dikatakan telah puas terhadap warganya terhadap pembangunan yang telah dilaksanakan di Aie Amo Data yang dimana dapat berjalan atau terlaksana dengan lancar karena adanya dukungan dari pihak seluruh komunitas. menunjukkan bahwa peran Lembaga Nagari sebagai pembina masyarakat dalam melayani masyarakat pemerintahan Nagari dapat dikatakan telah memuaskan warga sehingga pembangunan yang dilaksanakan di Nagari Aie Amo dapat berjalan atau terlaksana dengan lancar karena adanya dukungan dari seluruh masyarakat. Pelayanan yang diberikan pemerintah Nagari kepada masyarakat dalam hal ini berupa pengurusan dokumen yang tidak dipungut biaya. 2) Program pembangunan di Nagari Aie Amo dapat dilihat dari upaya intensif pengawalan aparatur pemerintahan Nagari termasuk Wali

¹⁹ Sarsena (2023). Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Rpjmn) Program Nawacita Dalam Meningkatkan Good Governance (Studi Dekriptif Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur), skripsi ekonomi syariah (Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Rpjmn) Program Nawacita Dalam Meningkatkan Good Governance (Studi Dekriptif Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur). Halm. 1

Nagari beserta jajarannya yang bekerja sama dengan Kepala Jorong yang merupakan tokoh masyarakat di wilayah tersebut. Sebagai pemerintah tingkat bawah pemerintah Nagari hanya dapat mengusulkan dan membantu segala pembangunan fisik yang ditetapkan berdasarkan hasil MUSREMBANG tingkat kecamatan. Karena pemerintahan Nagari hanya dapat melaksanakan perintah koordinasi dari pemerintah tingkat kecamatan yang merupakan wilayah administrasinya. 3) Peran kelembagaan Nagari dalam Pembangunan Nagari Aia Amo Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Partisipasi masyarakat yang cukup baik ini terlihat dari berbagai perhatian dari masyarakat terhadap segala pembangunan di lingkup pemerintahan Nagari Aie Amo 2). Kerjasama antar sesama Perangkat sangat harmonis antar sesama Perangkat Nagari, berupa keakraban yang terjadi antar sesama Perangkat, serta ketaatan seluruh Perangkat terhadap Ibu Wali Nagari.²⁰

Kelima penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain 2018 yang menjelaskan bahwa implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di desa Panciro sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari (a) penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai aturan, (b) pembangunan desa sudah terlaksana sesuai prosedur, (c) pembinaan kemasyarakatan desa sudah sesuai sasaran, dan (d) pemberdayaan masyarakat desa sudah sesuai sasaran. Faktor Pendukung Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di desa Panciro adalah (a) sumber daya manusia (b) komunikasi pelaksana

²⁰ Ade Hendra, Maiyulnita, dan Nasrizal, (2021). Peranan Lembaga Nagari Dalam Meningkatkan Pembangunan Di nagari Aia Amo Kabupaten Sijunjung. *Jurnal publik administration, business and rural development planning*.3 (1), 4-6.

program dan (c) dukungan pemerintah daerah. Faktor penghambat adalah (a) kurangnya partisipasi masyarakat dan (b) hadirnya tokoh politik.²¹

Perbedaan sudut pandang dan teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian menjadi kebaruan dalam penelitian ini. Penelitian ini akan mengkaji dari sudut pandang ilmu politik dengan mengkomporasikan dan menganalisis praktik kebijakan Pemerintah Nagari Pelangai Di Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan dengan implikasi yang dihasilkan menggunakan indikator implementasi pembangunan fisik RPJM Nag.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam proses pembangunan fisik pada RPJM Nag, berbagai karakteristik dan program-program yang ada dalam nagari harus diketahui, dipahami, dan diperhatikan. Pembangunan fisik dalam RPJM Nag sangat bergantung pada lembaga dan organisasi lokal. Sehingga, Infrastruktur tidak dapat dibangun atau dipertahankan tanpa institusi dan lembaga lokal, birokrasi, dan partisipasi.²² Sementara teknologi yang tepat tidak ditempatkan secara optimal maka pemerintah tidak dapat memelihara atau mempertahankan arus informasi yang dibutuhkan masyarakat, sehingga pelayanan masyarakat tidak dapat dilaksanakan secara efisien.

Jika dilihat bahwasannya terdapat program-program RPJM Nag Nagari Pelangai yang mana program-program ini dapat memberikan sebuah kemajuan dan

²¹ Zulkarnain (201). Implementasi Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Skripsi. Ilmu Adminstrasi Negara Universitas Muahammadiyah Makassar. Halm 98.

²²Peraturan Menteri Dalam Negeri 51/ 2007

kesejahteraan bagi Masyarakat Nagari Pelangai seperti pengembangan infrastruktur dasar, penyediaan air bersih dan sanitasi, pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan, program pemberdayaan ekonomi lokal, pembangunan berbasis partisipasi masyarakat, konservasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Terdapat beberapa program pembangunan fisik yang telah dilakukan oleh pemerintah nagari pelangai terhadap kesejahteraan nagari yang dimana program tersebut telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Pembangunan infrastruktur fisik seperti pembangunan rumah sakit desa, pembangunan ini telah dilakukan beberapa tahun terakhir oleh Pemerintah Nagari Pelangai dalam membantu masyarakat nagari agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan perawatan medis dalam nagari. Dengan adanya pembangunan rumah sakit desa atau puskesmas desa dapat memberikan kelancaraan dan kebutuhan yang utama bagi masyarakat nagari sehingga dengan terbantunya masyarakat dapat memberikan sebuah kemajuan bagi pembangunan Nagari Pelangai sendiri.



Gambar 1.1

Pembangunan Pos Kesehatan Nagari

Selain itu terdapat pembangunan jalan tani. Pembangunan jalan tani yang telah dilakukan sejak 5 tahun terakhir di Nagari Pelangai. Pembangunan ini

direncanakan sebelumnya untuk mempermudah akses pengangkutan hasil panen tani keluar. Pembangunan ini dapat memberikan kelancaran kepada para tani untuk beraktivitas sehingga kinerja para petani tidak terganggu seperti sebelumnya yang mana para petani mengalami kendala dalam membawa hasil panen mereka keluar. Sehingga mempersulit para tani untuk terus bertani. Pembangunan jalan tani yang diberikan pemerintah nagari dimanfaatkan oleh warga untuk semangat dan mempermudah para warga tani dalam bekerja dan mengelolah hasil panen masyarakat.



Gambar 1.2
Pembangunan Jalan Tani Nagari Pelangai

Terdapatnya pembangunan infrastruktur fisik nagari yaitu pembangunan posyandu desa. Pembangunan ini diberikan kepada Nagari Pelangai untuk mempermudah dan memperlancar imunisasi anak-anak balita dalam nagari dan ibu menyusui serta itu mengandung. Pembangunan ini memberikan sebuah hal yang positif terhadap masyarakat nagari. Sehingga dengan adanya pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat yang banyak bagi nagari. Pembangunan ini

membuktikan hasil kinerja yang dilakukan oleh pemerintah nagari untuk masyarakat setempat.



Gambar 1.3
Pembangunan Fisik Posyandu Nagari Pelangai

Dari itu terdapat pembangunan fisik lainnya yang dilakukan oleh pemerintah nagari yaitu pembangunan jalan dalam nagari. Pembangunan ini telah dilakukan oleh pemerintah nagari untuk memperlancar aktivitas masyarakat nagari dalam bekerja dan sekolah, dengan baiknya pembangunan jalan yang diberikan oleh pemerintah nagari dapat memberikan kelancaran terhadap pendidikan yang mana anak-anak tidak mengalami kendala untuk kesekolah serta mengurangi resiko kecelakaan. Sebelumnya terdapat kerusakan pembangunan jalan nagari di beberapa tempat yang membuat masyarakat menjadi kesusahan dalam beraktivitas, maka dari pemerintah memberikan sebuah perbaikan terhadap pembangunan jalan nagari.



Gambar 1.4
Pembangunan Jalan Nagari Pelangai

Pembangunan infrastruktur lainnya juga diberikan oleh pemerintah nagari yaitu pembangunan taman kanak-kanak bagi anak-anak nagari. Pembangunan ini dilakukan untuk mempermudah dan mengembangkan potensi anak-anak untuk belajar, bernyanyi, membaca dan mengenal dunia pendidikan. Pembangunan taman kanak-kanak berikan setiap kampung di Nagari Pelangai dalam meningkatkan mempermudah perkembangan potensial anak-anak dalam belajar.



Gambar 1.5

Pembangunan Taman Kanak-Kanak Nagari Pelangai

Selain dari beberapa pembangunan pemerintah nagari memberikan sebuah pembangunan saluran air sawa nagari. Pembangunan ini dilakukan untuk mempermudah kelancara para petani dalam mengatasi air sawa. Seperti genangan air sawa yang besar yang diakibatkan oleh derasnya hujan yang mengakibatkan

banyak masyarakat mengalami gagal panen yang diakibatkan oleh derasnya hujan yang menjadi sawah masyarakat mengalami kerusakan. Yang mana sebelumnya saluran air yang kecil sehingga membuat menguapnya air ke sawah masyarakat sehingga menghanyutkan padi masyarakat. Maka dari itu dengan adanya perbaikan saluran air sawa memberikan dampak positif bagi masyarakat nagari.



Gambar 1.6

Pembangunan Perbaikan Saluran Air Sawa Nagari Pelangai

Gambar di bawa ini dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020-2022 terdapatnya kerja pemerintah yang mana melakukan sebuah pembangunan lainnya yaitu pengeringan rawa, pemerintah memberikan sebuah kinerja yang baik terhadap Nagari Pelangai sendiri yaitu pengeringan rawa di Kampung Air Batu, pengeringan rawa ini di lakukan pada tahun 2022 di Kampung Air Batu menjadi suatu hal yang sangat diinginkan oleh Masyarakat Nagari Pelangai Kampung Air Batu sampai saat sekarang ini.



Gambar 1.6
Pengeringan Rawa di kampung Air Batu Nagari Pelangai

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pemerintah nagari telah memberikan beberapa pembangunan fisik RPJMNag terhadap Nagari Pelangai sehingga dengan adanya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah nagari memberikan sebuah kemajuan dan perkembangan serta kelancaran aktivitas masyarakat dan anak-anak Nagari Pelangai.

Tabel 1.1
Pembangunan Fisik Yang Telah Dilaksanakan di Nagari Pelangai
Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan 2022-2023

No	Pembangunan Tahun 2022	Pembangunan Tahun 2023
1	Pembangunan Pos Kanling di 5 Kampung	Rehap Jalan Dusun Punco Kayu
2	Pembangunan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Perbaikan Banda Pulau Betung Lesung Air
3	Peningkatan Jalan Punco Kayu	Perbaikan Banda Punco Kayu
4	Peningkatan Jalan Dusun Baru	Rehap Jalan Ringkar Dusun Baru
5	Pengeringan Rawa Air Batu	

Sumber: data pembangunan kantor wali nagari

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Nagari Pelangai sendiri dari tahun 2022-2023. Selain dari program tersebut Pemerintah Nagari Pelangai juga memberikan program pembangunan RPJMN nagari yang telah direncanakan dan akan dilaksanakan

di tahun 2024. Hal ini memberikan dampak positif bagi kehidupan Masyarakat Nagari Pelangai.

Tabel 1.2
Pembangunan Yang Akan Dilaksanakan Pada Tahun 2024 di Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan.

No	Pembangunan Yang Akan Dilaksanakan Tahun 2024
1	Perbaikan Jalan Punco Kayu
2	Rehap Jalan Dusun Baru
3	Pembuatan Pos Kamling Dusun Baru
4	Rehap Poskesri Air Batu
5	Drainase Dan Plat Deker Jalan Bukit Jarak Air Batu

Sumber: data kantor wali nagari pelangai

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya telah dilaksanakan di Nagari Pelangai. Program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah nagari sesuai yang direncanakan dalam RPJMN nagari. Sehingga program yang telah berjalan dengan baik memberikan kelancaran aktifitas masyarakat nagari.

Selain dari itu terdapat program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah nagari yaitu pembangunan fisik lainnya yang dimana program tersebut merupakan kepentingan masyarakat dan kepentingan mempermudah aktifitas organisasi-organisasi yang ada di nagari. Program pembangunan yang telah dilakukan yaitu seperti

Tabel 1.3
Program Pembangunan Fisik RPJM Nagari Pelangai 2022

No	Program pembangunan fisik
1	Penyaluran irigasi sawa
2	Perbaikan kantor wali nagari
3	Perbaikan administrasi pelayanan masyarakat
4	Perbaikan parkir kantor pelayanan nagari
5	Penerangan jalan umum nagari

6	Perbaikan jembatan kecil dalam nagari
7	Perbaikan taman kanak-kanak
8	Renovasi balai pertemuan nagari

Sumber: olahan data peneliti

Tabel di atas menjelaskan bahwa terdapatnya beberapa pembangunan fisik yang telah dilakukan yang sesuai dengan program dalam RPJMN nagari. Sehingga pembangunan dalam nagari tidak berdampak buruk bagi masyarakat. Sebelumnya pembangunan yang ada dalam nagari sangat memprihatikan bagi masyarakat karena berbeda dengan pembangunan fisik nagari lainnya. Pembangunan merupakan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian dan pelaksanaan suatu kegiatan, program, dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran suatu pembangunan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan visi dan misi suatu organisasi. Pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan pajak yang didapatkan oleh nagari tiap tahunnya. Masyarakat membayar pajak kepada nagari sesuai dengan apa yang didapatkan oleh masyarakat nagari.

Tabel 1.2
Target Dan Realisasi Pajak Bumi Dan Pembangunan
Nagari Di Kecamatan Ranah Pesisir 2020

Nagari	Target Rp	Realisasi Rp	Persentase
1. Sungai Tunu	Rp18.883.445	Rp14.786.652	78.30%
2. Pelangai	Rp21.705.674	Rp16.657.363	76.74%
3. Sungai Tunu Barat	Rp28.616.687	Rp20.409.095	71.32%
4. Sungai Tunu Utara	Rp23.485.406	Rp17.749.995	75.58%
5. Nyiur Melambai Pelangai	Rp35.079.804	Rp19.205.787	54.75%

6. Pelangai Kaciak	Rp15.379.438	Rp11.223.429	72.98%
7. Pelangai Gadang	Rp14.214.162	Rp8.615.619	60.61%
8. Koto VIII Pelangai	Rp28.082.201	Rp17.361.714	61.82%
9. Pasia Pelangai	Rp28.400.636	Rp20.466.044	72.06%
10. Sungai Liku Pelangai	Rp22.732.988	Rp15.238.385	67.03%
Jumlah	Rp236.580.441	Rp161.714.083	68.35%

Badan pendapatan kec. Ranah pesisir

Jika dilihat dari tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa Nagari Pelangai sendiri cukup tinggi target tahunan sebesar Rp 21.705.674 sedangkan realisasi Pelangai Rp 16.657.363, dengan persentase 76.74% cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa nagari seperti Sungai Tunu memiliki target Rp18.883.445, dengan realisasi Rp14.786.652, dan persentase 78.30%, dan Pelangai Kaciak memiliki target Rp15.379.438, dan realisasi Rp11.223.429, dengan persentase 72.98%, sedangkan Pelangai Gadang memiliki target Rp14.214.162, realisasi Rp8.615.619, dengan persentase 60.61% cukup rendah dari Nagari Pelangai.²³

Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti paparkan di atas, maka peneliti berasumsi dengan terdapatnya kendala dalam pembangunan RPJMN nagari yang dilakukan oleh pemerintah nagari dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari maka pemerintah lebih memaksimalkan dan lebih memperhatikan agar tiak adanya pembangunan yang memang harus di perbaiki agar kinerja pemerintah

²³Aditya, Kecamatan Ranah Pesisir Dalam Angka 2020, Badan Pusat Statistic Kabupaten Pesisir Selatan (BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2020).

berdampak positif bagi masyarakat. Jika pembangunan fisik RPJMN nagari cukup membaik maka kesejahteraan masyarakat akan tercapai dan kebutuhan masyarakat tercukupi dalam nagari. Dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti implementasi pembangunan fisik RPJMN Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2022. Berdasarkan hal ini, maka pertanyaan utama yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ” Bagaimana implementasi kebijakan pembangunan fisik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) di Nagari Pelangai Tahun 2021-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan implementasi pembangunan fisik RPJMN nagari yang ditinjau berdasarkan konsep implementasi pembangunan fisik Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan dalam RPJMNag pada Tahun 2021-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengembangan pemikiran dan perkembangan pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Politik dan Pemerintahan. Terutama berkaitan dengan implementasi pembangunan fisik RPJMN Nagari Pelangai Tahun 2021-2022. Khususnya bagi Mahasiswa Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas dan kepada para peneliti lainnya serta pembaca yang membaca penelitian ini.

1.4.2 Manfaat praktis

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kajian yang baik dalam implementasi Pembangunan fisik pada RPJMN Nagari Khususnya Nagari Pelangai.
2. Diharapkan peneliti dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai implementasi pembangunan fisik pada RPJMN nagari Terutama Dalam Sektor Pembangunan fisik pada RPJMNag di Nagari Pelangai.
3. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi suatu panduan dan rancangan akademis yang bisa berguna untuk masyarakat dan peneliti lainnya khususnya mahasiswa yang meneliti implementasi pembangunan fisik RPJMN nagari sebagai bahan pedoman penelitian selajutnya

